



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT
TIM TEKNIS EITI**

- Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2016
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda : 1. Pembahasan Roadmap Beneficial Ownership (BO)
2. Pembahasan Rencana Impact Assessment
3. Pembahasan Rencana Pilot Commodity Trading (CT)
- Peserta Rapat : 1. Kementerian Perekonomian, Deputi III: Bastian H
2. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adijanto, Sigit Harjanto
3. SKK Migas: Selvi
4. Bappenas; M. Isro, Frido, Yoga
5. CSO: Aryanto, Asri Nuraeni, Kanti, wahyudi
6. Sekretariat EITI: Edi Effendi, Ronald T, Doni Erlangga, Agus T, Hadian, Anggi

A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma mewakili Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Bpk Bastian Halim. Bpk Edi menyampaikan agenda rapat yaitu pembahasan roadmap Beneficial Ownership (BO), impact assesment, dan rencana pilot Commodity Trading (CT).

B. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN & TANGGAPAN

Bpk Edi menyampaikan materi yang menjadi pembahasan dalam rapat:

1. Pembahasan Roadmap Beneficial Ownership (BO)

Pak edi mengatakan banyak inisiatif tentang BO seperti di G20 di Kemenko Perekonomian dan KPK. Sekretariat EITI hadir pada tanggal 21-22 September di KPK dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang BO. KPK mengkoordinir beberapa instansi dalam penyusunan roadmap BO, namun roadmap BO di KPK diperkirakan selesai 2017, sementara roadmap BO EITI harus selesai tahun ini. Scope BO KPK lebih luas daripada EITI karena mencakup sektor keuangan secara umum.

Karena banyaknya kesamaan pihak yang berkepentingan apakah pembuatan BO EITI akan berkoordinasi dengan KPK atau jalan sendiri? Bagaimana dengan jadwal penyelesaian roadmap?

Penyelesaian roadmap bisa membayar konsultan individual, namun waktu sudah sempit dan harus mendapatkan konsultan yang benar-benar mengerti tentang BO.

Pembahasan di KPK adalah apakah akan ada Sekretariat BO untuk pusat data, namun pasti sulit dilaksanakan karena akan ada penolakan beberapa pihak terhadap pembukaan data.

Tanggapan

Pak Adijanto (DJ Perbendaharaan, Kemenkeu):

- Waktu penyelesaian roadmap sangat pendek sehingga harus memaksimalkan kemampuan yang ada. Kalau MSG bekerja sendiri akan sulit, karena KPK juga kesusahan mengumpulkan para stakeholder, jadi ada baiknya bersama-sama saja.
- Konsultan sebaiknya diambil dari UGM atau UI yang bekerjasama dengan KPK sehingga tak terlalu banyak perbedaan.
- Apabila KPK sudah memiliki definisi tentang BO diikuti saja, karena kalau ada perbedaan bisa menimbulkan gap yang dapat menimbulkan dampak yang luas seperti perubahan UU.

Pak Bastian (Sekretaris Tim Transparansi)

- Permohonan maaf keterlambatan hadir dalam rapat
- Penyelesaian BO harus berkoordinasi dengan instansi lain karena waktu yang sempit.
- Apabila terjadi perbedaan definisi BO tak akan hanya membingungkan pemerintah, tapi juga investor dan perusahaan.

Pak Aryanto (PWYP)

- Kalau berjalan sendiri, dikhawatirkan overlap dengan KPK, agar dibuat irisan untuk dampak yang sinkron antar semua inisiatif agar lebih efektif.
- Perbedaan definisi juga memiliki masalah karena masih ada perbedaan definisi BO di KPK, pajak, dan PPAATK.
- Dalam penyelesaian roadmap BO agar ada subroadmap misal: untuk industri ekstraktif.

Bu Selvi (SKK Migas)

- Data tentang BO tersebar dimana-mana sehingga sulit untuk dikumpulkan. Di perusahaan Migas sangat sulit mengetahui ultimate BO karena banyaknya layer perusahaan dan tiap perusahaan membuat sub company tiap blok.

Frido (Bappenas):

- Akan dilaksanakakan workshop tentang BO di Bappenas, semua yang berkepentingan akan memaparkan definisi tentang BO. Namun definisi BO secara umum dan tak terfokus ke EITI.

Isro (Bappenas)

- KPK melihat pelaksanaan BO di beberapa negara. Telah diusulkan agar perwakilan masyarakat sipil dilibatkan dalam pembuatan roadmap BO di KPK.
- Kajian di KPK, pembukaan BO berbeda tiap level tertinggi (presiden), hingga masyarakat umum.

Pak Edi

- Ada 2 alternatif dalam koordinasi dengan KPK:
 1. Ikut dengan KPK dan langsung bergabung untuk mengambil bahan-bahan dari KPK untuk diambil sebagai roadmap.
 2. Pak Bastian dan Kedepuitan lain di Kemenko langsung berhubungan dengan direktorat di KPK
- Ada perbedaan definisi BO antara Standar EITI dengan DJ Pajak karena EITI juga menyoroti Political Expose Person (PEP) yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Perlu adanya definisi PEP atau "backing perusahaan". Cara mendapatkan data PEP sangat sulit dan sudah ditanyakan pada saat FGD di KPK, namun jawabannya kurang memuaskan yaitu melalui LHKPN, padahal PEP belum tentu pejabat publik.
- EITI akan bergabung dengan Pokja KPK dan akan bertemu dengan Bappenas dan KPK untuk menentukan timeline agar bisa menyelesaikan roadmap EITI di akhir 2016.

2. Pembahasan Impact Assessment EITI

Pak Edi:

- Untuk mengetahui dampak EITI, akan diadakan impact assessment dengan dana dari Bank Dunia.
- Assessment untuk menilai pencapaian EITI sejak 2010 yaitu melalui Tim Pelaksana, Tim Pengarah, Sekretariat. Juga akan mereview institusi utama dalam pelaksanaan EITI.

Aryanto:

- Perlu ditanyakan apakah evaluasi impact berdasarkan Standar EITI atau Perpres?

Isro:

- Keberhasilan transparansi tak bisa bekerja sendiri pasti ada faktor lain. Jangan sampai pihak lain merasa hasil kerjanya diklaim..

3. Pembahasan Pilot Commodity Trading

Pak Edi:

- Indonesia ditawarkan sebagai negara pilot dalam transparansi commodity trading, Sekretariat EITI Internasional akan berdiskusi dengan KPK, Pertamina, dan SKK Migas.
- Keuntungan menjadi negara pilot, Indonesia akan lebih siap apabila ada standar baru, namun lebih repot di awal, apalagi Laporan EITI 2014 saja masih belum selesai.

Selvi:

- SKK Migas akan melakukan teleconference dengan Sekretariat EITI Internasional dengan batasan argumentasi karena ada beberapa hal yang tak bisa dibuka, misalkan harga, karena terkait persaingan usaha.

C. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

1. Penyusunan roadmap BO EITI akan berkoordinasi dengan penyusunan roadmap BO di KPK.
2. Impact Assessment akan dilakukan dengan dana dari Bank Dunia dengan mempertimbangkan standar assessment.
3. Sekretariat EITI Internasional akan teleconference dengan beberapa instansi terkait penawaran pilot transparansi commodity trading. Keputusan bergabung atau tidaknya Indonesia sebagai negara pilot ada di rapat Tim Pelaksana EITI.